

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR INSPEKTORAT
ACEH TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

FEBY AYU ANGGRAINI
NPM : 1702110150



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 September 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FEBY AYU ANGGRAINI
NPM : 1702110150

Dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR INSPEKTORAT ACEH
TAHUN 2018-2020

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 September 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FEBY AYU ANGGRAINI
NPM : 1702110150

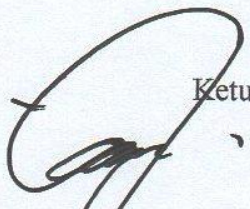
Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR INSPEKTORAT ACEH
TAHUN 2018-2020**

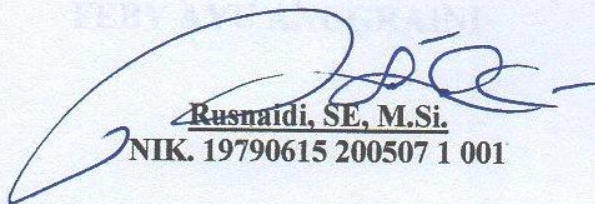
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 19 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

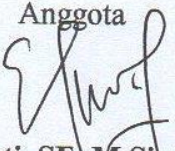
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

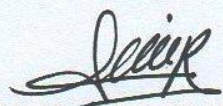
Sekretaris


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

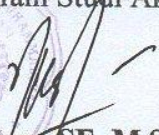
Anggota


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota


Maidar, SE, M.Si.
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Inspektorat Aceh Tahun 2018-2020.”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang senantiasa berusaha memperbaiki akhlaq umat manusia menjadi insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

Meski tulisan ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kemurahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda (Alm) Jamaluddin ismail , ibunda (Almh) Sariani dan abang dan kaka(putrid anjani, putra jerry arista, rahmat masri, jefriansyah, noviawati) yang selalu memberikan do'a, dorongan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.

2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng SE,M,SI,MM. selaku dekan fakultas ekonomi universitas muhammadiyah aceh
3. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Ibu, Eva Susanti, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rusnaidi, SE,MSi. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.
9. Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
10. Sahabat-sahabat penulis Yeni Amelia, Isra Farahna, Cinta Syahira, M.Redho Al Fathir, Shelfi Hasrina, Nur Rahmayani, Aida Fitri, Desi Rahmayani, Alfi Sarah, Asrazul Ikhsan, Ardiansyah, Putri Salwa Nabila, Rahmat Mulya Lizar, Yasir Hidayatullah, yang telah banyak membantu penulis.

11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh, 6 Agustus 2021

Feby Ayu Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Anggaran	6
2.1.1.1 Pengertian Anggaran	6
2.1.1.2 Tujuan Penyusunan Anggaran.....	7
2.1.1.3 Manfaat Anggaran	8
2.1.1.4 Fungsi Anggaran.....	8
2.1.1.5 Karakteristik Anggaran.....	9
2.1.2 Anggaran Sektor Publik	10
2.1.3 Belanja Pemerintah	11
2.1.4 <i>Value For Money</i>	12
2.1.5 Efektivitas	13
2.1.5.1 Pengertian Efektivitas	13
2.1.5.2 Pengukuran Efektivitas	14
2.1.6 Efisiensi.....	15
2.1.6.1 Pengertian Efisiensi	15
2.1.6.2 Pengukuran Efisiensi	15
2.2 Penelitian Sebelumnya	16
2.3 Kerangka pemikiran	20
 BAB III METODE PENELITIAN	 21
3.1 Desain Penelitian	21
3.1.1 Tujuan	21
3.1.2 Jenis Penelitian	21
3.1.3 Horizon Waktu	22
3.1.4 Unit Analisis	22
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.3 Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1	Gambaran Umum Inspektorat Banda Aceh	25
4.1.1	Sejarah dan Visi Misi Inspektorat Banda Aceh.....	25
4.1.2	Tugas dan Fungsi Inspektorat Banda Aceh	25
4.1.3	Struktur Organisasi Inspektorat Banda Aceh	26
4.1.4	Bagan Organisasi Inspektorat Banda Aceh	32
4.2	Hasil Penelitian	33
4.2.1	Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Inspektorat Banda Aceh.....	33
4.2.2	Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Pada Inspektorat Banda Aceh.....	35
4.3	Pembahasan	37
4.3.1	Analisis Efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Inspektorat Aceh.....	37
4.3.2	Analisis Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Inspektorat Aceh.....	38
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Ralisasi Anggaran Belanja	3
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektivitas	15
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efisiensi	16
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 4.1 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Inspektorat Banda Aceh	34
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Inspektorat Banda Aceh	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Inspektorat Banda Aceh	32

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020**

FEBY AYU ANGGRAINI
NPM : 17021110150

Pembimbing :1) Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. CA
2) Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja dinas Inspektorat Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan anggaran dan belanja Dinas Inspektorat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas anggaran dan belanja dinas inspektorat Aceh tergolong cukup efektif. (2) efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya efisiensi anggaran di Dinas Inspektorat Aceh tergolong Kurang efisien dari tahun ke tahun.

Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi, Anggaran dan Belanja, Inspektorat Aceh

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020**

FEBY AYU ANGGRAINI
NPM : 17021110150

Pembimbing :1) Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. CA
2) Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and efficiency of the Aceh Inspectorate's budget and expenditure. In this study using a quantitative descriptive approach with data collection techniques, namely observation and interviews. The data used is secondary data in the form of financial statements of the budget and expenditures of the Aceh Inspectorate service. The result showed that (1) the Aceh Inspectorate's budget and expenditure was quite effective. (2) efficiency is a measure of success of an activity that is assessed based on the amount of cost or resources budget efficiency in the Aceh Inspectorate office classified as less efficient from year to year

**Keywords : Effectiveness, Efficiency, Budget and Expenditure, Aceh
Inspectorate**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perwujudan *good government* diperlukan untuk perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari system lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menggapi paradigma tersebut, pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangga nya sendiri agar berdaya guba dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor public dengan memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitas nya.

Sejalan dengan itu, dalam rangka otonomi daerah, Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah. Membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua undang-undang ini membawa kosekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik yang dimuat

dalam dokumen perencanaan stratejik. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan stratejik tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Anggaran pemerintah merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/ organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya organisasi pemerintah dituntut untuk memperhatikan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran serta efisien dalam penggunaan sumber daya dengan meminimalkan penggunaan dan memaksimalkan hasilnya. (Mardiasmo, 2016)

Dinas Inspektorat Aceh sebagai salah satu pemerintahan juga menggunakan dana dari sektor publik dalam menjalankan programnya, tentunya tidak input dari ekspektasi masyarakat yang mengharapkan semua kegiatannya telah memiliki kriteria yang terdapat dalam konsep *value for money* yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan juga efektif dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Salah satunya fungsi dari dinas inspektorat yaitu membantu bagian pemerintah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tentunya realisasi program atau pencapaian target yang hendak

dicapai akan sangat dirasakan oleh masyarakat umum karena realisasi dari dinas inspektorat akan terasa secara nyata dan akan dirasakan langsung keberadaan dan gunanya untuk masyarakat. Berikut ini tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Inspektorat Aceh 2018-2020.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Inspektorat Aceh 2018-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Presentase Realisasi Anggaran (%)
2018	Rp. 28.706.979.189	Rp.24.300.727.271	84.65%
2019	Rp. 31.702.318.331	Rp.29.035.999.195	91.58%
2020	Rp.40.890.889.553	Rp. 33.618.199.461	82.21%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2020 terjadi kenaikan jumlah anggaran tiap tahunnya. Di tahun 2019 terjadi kenaikan anggaran dari tahun 2018 sebesar Rp.2.995.339.142 dan tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.188.571.222. kenaikan jumlah anggaran ini juga diikuti dengan naiknya tingkat realisasi setiap tahunnya. Dilihat dari segi presentase realisasi anggaran belanja Dinas Inspektorat Aceh di tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 6.93% dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 9.37%. hal ini berarti bahwa ada terjadi fluktuasi dari presentase realisasi anggaran Dinas Inspektorat Aceh.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Inspektorat Aceh serta antinya dapat menjadi masukan dan saran kepada Inspektorat agar dapat mengelola anggaran yang telah dianggarkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas anggaran belanja pada inspektorat Aceh tahun anggaran 2018-2020.
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi anggaran belanja pada inspektorat Aceh tahun anggaran 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Inspektorat Aceh tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua elemen yang membutuhkan dan dijadikan masukan kepada Dinas Inspektorat Aceh.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis, terdapat beberapa manfaat hasil penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas, efisiensi dan anggaran belanja.
- b. Manfaat bagi penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dibatasi dengan ruang lingkup penelitian dengan judul *bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Inspektorat Aceh tahun 2018-2020.*

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba. Bagi suatu perusahaan , penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membuat aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian dan lainnya. Anggaran disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar,2010). Menurut Narifin (2012) anggaran merupakan rencana tertulismengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, (Purwanti dan Darsono,2013). Menurut Halim dan Kusuma,(2014) Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan

dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dalam penilaian kinerja.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dilakukan secara sistematis dan formal untuk mencapai tujuan dan dilakukan melalui koordinasi dan kontrol tanggung jawab manajemen.

2.1.1.2 Tujuan Penyusunan Anggaran

Anggaran merupakan alat dalam manajemen yang memberikan petunjuk mengenai beberapa perkiraan yang tersedia pada suatu saat dan untuk beberapa lama, tujuan penyusunan anggaran dalam setiap perusahaan pada dasarnya sama, yaitu untuk merencanakan posisi anggaran untuk suatu periode di masa yang akan datang.

Menurut Purwanti dan Darsono (2013) tujuan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja.
2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer.
4. Membantu dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015) tujuan anggaran antara lain:

1. Perencanaan
Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi
Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi
Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian
Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran adalah untuk memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahannya yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

2.1.1.3 Manfaat Anggaran

Menurut Nafarin (2012) anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
2. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghindari penggunaan dana yang tidak perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan.
8. Dapat dipergunakan sebagai alat perbandingan kinerja di periode yang akan datang.

2.1.1.4 Fungsi Anggaran

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. maka anggaran dapat diperlukan dalam suatu perusahaan. Berikut fungsi anggaran menurut Munandar (2010) :

1. Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target- target yang harus dicapai oleh kegiatan- kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja.

Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang dapat dalam perusahaan menunjang saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

3. Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses atau kurang.

Menurut Mulyadi (2016) fungsi anggaran ada beberapa antara lain:

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
4. Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil oprasi sesungguhnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

2.1.1.5 Karakteristik Anggaran.

Suatu organisasi atau perusahaan dituntut untuk membuat laporan anggaran yang baik dan benar. Adapun karakteristik anggaran yang baik dan benar menurut Mulyadi (2016) diantaranya sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Anggaran hanya dapat diubah dibawah koordinasi tertentu.
6. Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan dan pembiayaan bagi pemerintah dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Menurut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian anggaran adalah pendoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat atau daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mardiasmo (2015) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

2.1.3 Belanja Pemerintah

Pemerintah no 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Definisi lain berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2011⁶ sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2007 dan Adanya Perubahan Kedua dengan Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Menurut Siregar (2015) Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak diperbarui secara langsung oleh program/ kegiatan. (Halim,2017). Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Mahmudi,2016). Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1) Belanja pegawai, dengan objek belanja meliputi:

- a) Gaji dan Tunjangan.
- b) Tambahan penghasilan PNS.
- c) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD.
- d) Biaya pemungutan Pajak daerah.

2) Belanja bunga

- a. Belanja hibah
- b. Belanja subsidi
- c. Belanja bantuan sosial.
- d. Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten kota dan pemerintah desa.

2.1.4 Value For Money

Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

Value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi (Mahmudi, 2015). *Value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik (Ardila, 2015).

2.1.5 Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun (Robbins, 2015). Efektivitas adalah suatu yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi Output (Nordiawan Deddi & Ayuningtyas, 2016).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan.

2.1.5.2 Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target pedapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut rumus untuk mengukur tingkat anggaran belanja (Halim,2016)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 jika jumlah rasio efektivitas lebih besar dari 100% maka kemampuan keuangan dapat dikatakan sangat efektif. selanjutnya ketika jumlah rasio efektivitas berkisar antara 90%-100% maka kemampuan keuangan dikatakan efektif. jumlah rasio efektivitas berkisar antara 80%-90% maka kemampuan keuangan dikatakan cukup efektif. dan jika rasio efektivitas berkisar antara 60% - 80% maka kemampuan keuangan dikatakan kurang efektif. demikian juga jika rasio efektivitas <60% maka kemampuan dikatakan tidak efektif. untuk kriteria rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

2.1.6 Rasio Efisiensi

2.1.6.1 Pengertian Efisiensi

Analisis efisiensi sesuai dengan Kepmendagri No.13 tahun 206, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output). Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang beli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu.

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan output sebesar-besarnya (Nordawan Deddi & Ayu Ningtyas, 2016).

2.1.6.2 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja (Halim, 2016). Berikut rumus untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi menurut Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 jika jumlah rasio efisiensi lebih besar dari 100% maka kemampuan keuangan dapat dikatakan tidak efisien. Selanjutnya ketika jumlah rasio efisiensi berkisar antara 90% - 100% maka kemampuan keuangan dikatakan kurang efisien. Jumlah rasio efisiensi berkisar antara 80%-90% maka kemampuan dikatakan cukup efisiensi, demikian jika rasio efisiensi <60% maka kemampuan keuangan dikatakan sangat efisien. Untuk kriteria rasio efisiensi dapat dipilih pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi (%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Afuan & Novia (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat edektivitas terhadap anggaran belanja masuk kedalam katagori cukup efektif. sedangkan tingkat efisiensi terhadap anggaran belanja menunjukkan katagori efisien dan sangat efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Roudlotul (2017). Yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. Metode penelitian yang

digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran dibidang pendidikan dinilai tidak efektif. tingkat efisiensi anggaran pendidikan dalam katagori kurang efektif. tingkat efektivitas anggaran dibidang kesehatan secara rata-rata kurang efektif. tingkat efisiensi anggaran kesehatan menunjukkan kurang efisien dan tidak efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Immanuel & Sherly (2015) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yaitu Deskriptif. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumenge(2013) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Minahasa Selatan. Metode penelitian yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Selatan sangat bervariasi tapi sudah bisa dikatakan efektif dan tingkat rasio efisiensi anggaran belanja yang dicapai sudah diolah secara efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Julita (2012) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif dalam menetapkan target anggaran pendapatan karena hanya mencapai 11,28%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak baik bagi instansi karena dapat melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran belanja.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Penelitian sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman Afuan & Novia (2020)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat edektivitas terhadap anggaran belanja masuk kedalam katagori cukup efektif. sedangkan tingkat efisiensi terhadap anggaran belanja menunjukkan katagori efisien dan sangat efisien	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. Roudlotul (2017)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran dibidang pendidikan dinilai tidak efektif. tingkat efisiensi anggaran pendidikan dalam katagori kurang efektif. tingkat efektivitas anggaran dibidang kesehatan secara rata-rata kurang efektif. tingkat efisiensi anggaran kesehatan menunjukkan kurang efisien dan tidak efisien.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Tabel Lanjutan 2.3

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yaitu Deskriptif Immanuel & Sherly (2015)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
4	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Minahasa Selatan. Metode penelitian yaitu deskriptif Sumenge(2013)	Deskriptif	Hasil peneliian menunjukkan bahwa rasio efektivitas Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Selatan angat bervariasi tapi sudah bisa dikatakan efektif dan tingkat rasio	Eketivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara. Julita (2012)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif dalam menetapkan target anggaran pendapatan karena hanya mencapai 11,28%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak baik bagi intansi karena dapat melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran belanja.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggran belanja pada Dinas Inspektorat Aceh adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang pengelolaan anggaran. Pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan daerah. Efektivitas menggambarkan kemampuan Dinas Inspektorat Aceh dalam merealisasikan pendapat oleh pemerintah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang semakin baik.

Efisiensi menggambarkan kemampuan Dinas Inspektorat dalam merealisasikan anggaran belanja langsung dan kemudian dibandingkan dengan merealisasikan anggran belanja yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini semakin sedikit biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dapat dikatakan semakin efisien.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu: tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu, dan unit analisis (Sekaran, 2017).

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi laporan anggaran belanja pada Dinas Inspektorat Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil makna dari pada generalisasi

(Sugiyono,2018). Alam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudia mengambil kesimpulan dan memberi saran.

3.1.3 Horizon waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian *cross sectional*, yaitu penelitian yang oengambilan datanya dilakukan melalui observasi dan dukomentasi hanya dalam satu waktu saja.

3.1.4 Unit analisis

Berkaitan dengan penentuan masalah apa yang dimaksud, peneliti mebutuhkan laporan realisasi anggaran dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian in, maka unit analisis yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran Dinas Inspektorat Aceh.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh se berupa laporan realisasi anggaran Dinas Inspekrorat Aceh tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari bagian keuangan Dinas Inspektorat Aceh dan mendownload beberapa data lainnya melalui situs resmi Dinas Inspektorat Aceh.

3.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Teknik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono,2018).

Dalam hal ini yang dimaksud adalah menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung perbandingan target belanja dengan realisasi belanja yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran Dinas Inspektorat Aceh tahun 2018-2020.

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan. Analisis efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran (Halim,2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas anggaran adalah :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Berdasarkan rumus diatas, apabila perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran mencapai lebih dari 100% maka anggaran dapat dikatakan sangat efektif dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran dibawah 60% maka anggaran dikatakan tidak efektif. Dengan kata lain semakin besar tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan

semakinefektif, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk hasil yang diterima (Halim,2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efisiensi anggaran adalah :

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100$$

Berdasarkan rumus diatas, apabila hasil perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran mencapai kurang dari 60%, maka anggaran dapat dikatakan sangat efisien dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran di atas 100% maka anggaran dapat dikatakan tidak efisien. Dengan kata lain semakin rendah tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efisien, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Inspektorat Banda Aceh

4.1.1 Sejarah dan Visi Misi Inspektorat Banda Aceh

Inspektorat kota Banda Aceh beralamat JL Prof. Ali Hasyimi Lr. Keucik Daud Gampong Pango Raya Kecamatan ulee kareng kota Banda Aceh, Nangroe Aceh darussalam. Dengan visi kota banda aceh “ terwujudnya kota banda aceh gemilang dalam bingkai syariah”, dan misi kota banda aceh meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik, melalui peyelegaraan pemerintah yang berfrosional, efektivitas, efisiensi transparan dan akuntansi dan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai tujuan visi dan misi tersebut:

4.1.2 Tugas dan fungsi Inspektorat Banda Aceh

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh, Inspektorat Kota Banda Aceh mempunyai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Walikota dalam pembinaan dan pengawasan atas kinerja organisasi pemerintah daerah;

2. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan melakukan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Fungsi inspektorat banda aceh antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Aceh

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh, maka Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banda Aceh, Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Inspektur Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan kota, kecamatan, mukim dan gampong yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Inspektur mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang pembinaan dan pengawasan;
2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat: Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Inspektorat;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Inspektorat; dan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah,

evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan

- keuangan, revidir laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, revidir rencana kerja anggaran, revidir laporan keuangan, revidir laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, revidir rencana kerja anggaran, revidir laporan keuangan, revidir laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, revidir rencana kerja anggaran, revidir laporan keuangan, revidir laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan

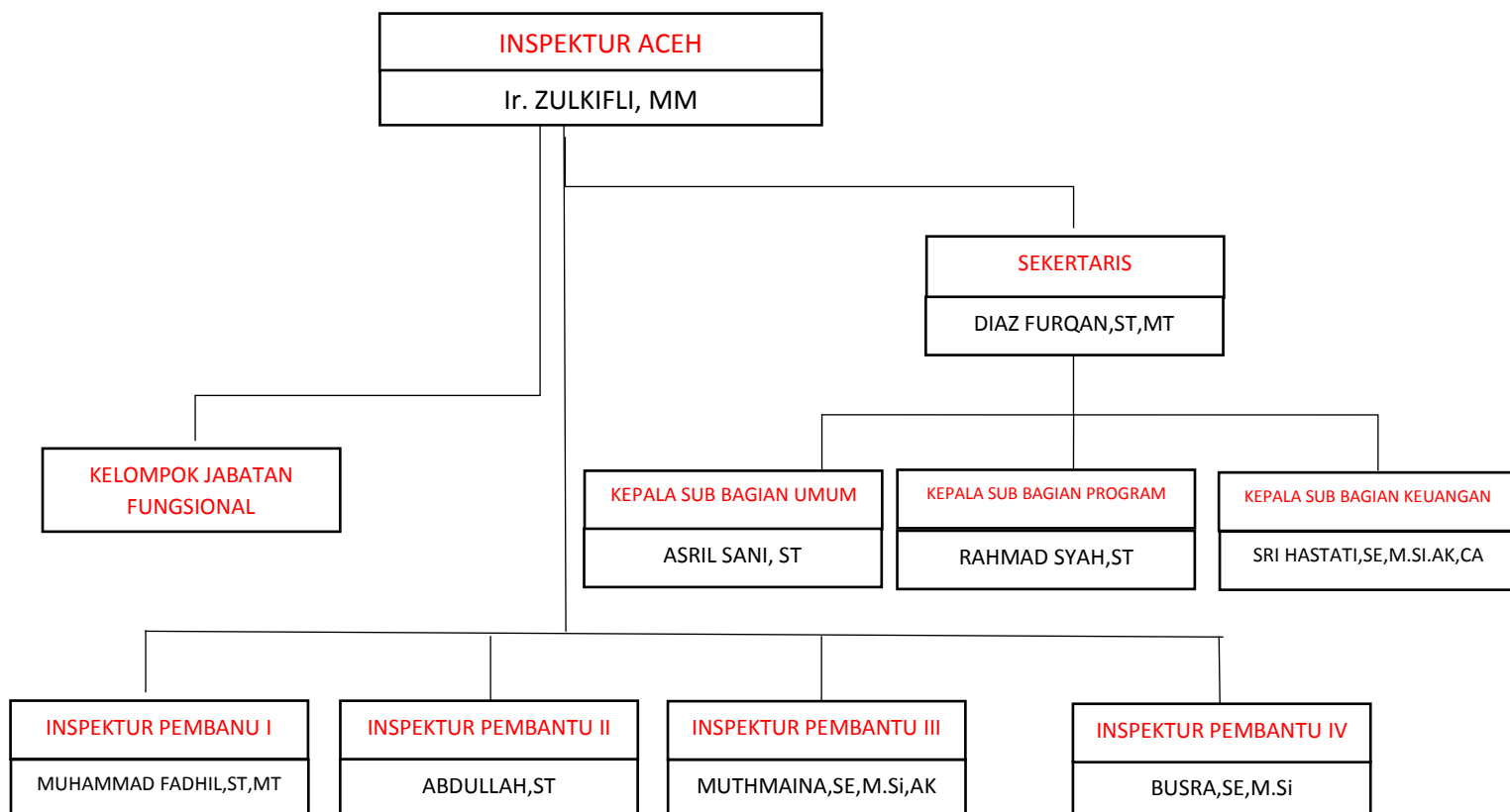
terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang 11 pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas 12 pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan

pemerintah gampong, revidir rencana kerja anggaran, revidir laporan keuangan, revidir laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4.1.4 Bagan Organisasi Inspektorat Banda Aceh



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Inspektorat Banda Aceh

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif 100% maka dinilai sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka dinilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Efektivitas anggaran tahun 2018 :

$$2018 = \frac{\text{Rp.24.300.727.271}}{\text{Rp.28.706.979.189}} \times 100\% = 84.65 \%$$

Pada tahun 2018 target anggaran Inspektorat adalah Rp.28.706.979.189 dan anggaran yang terealisasi Rp. 24.300.727.271 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 84.65%. rasio efektivitas antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran inspektorat banda aceh menunjukkan kineja yang cukup baik

Efektivitas anggaran tahun 2019 :

$$2019 = \frac{\text{Rp.29.035.999.195}}{\text{Rp.31.702.318.331}} \times 100\% = 91,58 \%$$

Pada tahun 2019 target anggaran Inspektorat adalah Rp.31.702.318.331 dan anggaran yang terealisasi Rp. 29.035.999.195 hal ini menunjukkan rasio

efektivitas sebesar 91.58%. rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran inspektorat banda aceh menunjukkan kineja yang baik.

Efektivitas anggaran tahun 2020 :

$$2020 = \frac{\text{Rp.33.618.199.461}}{\text{Rp. 40.890.899.553}} \times 100\% = 82,11 \%$$

Pada tahun 2020 target anggaran Inspektorat adalah Rp.33.618.199.461 dan anggaran yang terealisasi Rp. 40.890.889.553 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 82.21%. rasio efektivitas antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran inspektorat banda aceh menunjukkan kineja yang cukup baik.

Hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran belanja inspektorat banda aceh dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Inspektorat Banda Aceh

Tahun	Anggaran Belanja			
	Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase	Keterangan
2018	Rp. 28.706.979.189	Rp. 24.300.727.271	84.65%	Cukup Efektif
2019	Rp. 31.702.318.331	Rp.29.035.999.195	91.58%	Efektif
2020	Rp. 40.890.899.533	Rp. 33.618.199.416	82.21%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Inspektorat Banda Aceh tahun 2018-2020 dapat dikatakan cukup efektif. Hal itu dapat dilihat dari rasio efektivitas tahun 2018 yang mencapai 84.65%, tahun 2019 rasio efektivitas yang mncapai 91.58 % dan tahun 2019 rasio efektivitas yang mencapai 82.21%.

4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pada Inspektorat Banda Aceh

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja. Kinerja anggaran pemerintah dapat dikatakan efisien apabila semakin sedikit jumlah dana yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi anggaran tahun 2018

$$2018 = \frac{\text{Rp.24.037.359.473}}{\text{Rp.24.300.727.271}} \times 100\% = 98,91\%$$

Pada tahun 2018 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung Inspektorat Banda Aceh Rp.24.037.359.473 dengan realisasi anggaran belanja Rp.24.300.727.271 ,menunjukkan rasio rasio efisiensi sebesar 98.91% rasio efisiensi antara 90%-100% dapat dikatakan kurang efisien . hal ini berarti kinerja anggaran Inspektorat Banda Aceh pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang kurang efisien.

Efisiensi anggaran tahun 2019

$$2019 = \frac{\text{Rp. 26.879.675.945}}{\text{Rp. 29.035.999.195}} \times 100\% = 92,57\%$$

Pada tahun 2019 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung Inspektorat Banda Aceh Rp.26.879.675.945 dengan realisasi anggaran belanja Rp.29.035.999.195 ,menunjukkan rasio rasio efisiensi sebesar 92.57% rasio efisiensi antara 90%-100% dapat dikatakan kurang efisien . hal ini bearti kinerja anggaran Inspektorat Banda Aceh pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang kurang efisien.

Efisiensi anggaran tahun 2020

$$2020 = \frac{\text{Rp.30.147.212.053}}{\text{Rp.33.618.199.461}} \times 100\% = 89,67 \%$$

Pada tahun 2020 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung Inspektorat Banda Aceh Rp.30.147.212.053 dengan realisasi anggaran belanja Rp.33.618.199.461,menunjukkan rasio rasio efisiensi sebesar 89.67% rasio efisiensi antara 80%-90% dapat dikatakan cukup efisien . hal ini bearti kinerja anggaran Inspektorat Banda Aceh pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup efisien.

Hasil penelitian rasio efisiensi anggaran belanja Inspektorat Banda Aceh dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Inspektorat Banda Aceh

Tahun	Anggaran Belanja			
	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Presentase	Keterangan
2018	Rp. 24.037.359.473	Rp. 24.300.727.271	98.91%	Kurang Efisien
2019	Rp. 26.879.675.945	Rp.29.035.999.195	92.57%	Kurang Efisien
2020	Rp. 30.147.212.053	Rp. 33.618.199.416	89.67%	Cukup Efisien

Sumber: data diolah,2021

Dari tabel tersebut data disimpulkan bahwa kinerja anggaran inspektorat Banda Aceh dari tahun 2018-2020 mengalami presentase efisiensi yang naik turun. Dari tahun 2018-2020 hanya ditahun 2020 kinerja anggaran Inspektorat Banda Aceh yang mencapai presentase efisiensi sebesar 89.67 dan dinilai cukup efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase efisien untuk tahun 2018 sebesar 98.91% dan tahun 2019 sebesar 92.57%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Inspektorat Aceh

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif dengan beberapa nilai perhitungan rasio. Semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Inspektorat Aceh adalah 84.65% yang artinya Inspektorat Aceh dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 80%-90% hal ini berarti kinerja Inspektorat Aceh pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Inspektorat Aceh adalah 92.58% yang artinya Inspektorat Aceh dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90-100%. Hal ini berarti dalam pelaksanaan kinerja Inspektorat Aceh pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik.

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Inspektorat Aceh adalah 82.21% yang artinya Inspektorat Aceh dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 80-900%. Hal ini berarti dalam pelaksanaan kinerja Inspektorat Aceh pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Anggaran belanja yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena proses perumusan anggaran belanja tidak dibahas dengan matang. Koordinasi antar ini juga menjadi faktor penyebab yang lain. Bisa jadi anggaran yang dipakai bertahun-tahun ini merupakan proses anggaranyang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga anggaran tersebut tidak mencerminkan program kerja yang nyata bagi Inspektorat Aceh yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja menjadi tidak bisa maksimal.

4.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Inspektorat Aceh

Pengukuran kinerja Inspektorat Aceh dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran.

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Inspektorat Aceh adalah 98.91%. artinya Inspektorat aceh dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 90%-100%. Hal ini berarti Inspektorat Aceh pada tahun 2018 dinilai kurang baik .

2. Pada tahun 2019

Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Inspektorat Aceh adalah 92.57 artinya Inspektorat aceh dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 90%-100%. Hal ini berarti Inspektorat Aceh pada tahun 2019 dinilai kurang baik .

3. Tahun 2020

Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Inspektorat Aceh adalah 89.67%. artinya Inspektorat aceh dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 80%-90%. Hal ini berarti Inspektorat Aceh pada tahun 2020 dinilai cukup baik .

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan sebagian besar sumber dana yang dimiliki oleh Inspektorat Aceh kurang mampu diwujudkan dan digunakan untuk kepentingan belanja organisasi. Dana yang berasal dari anggaran belanja tersebut tidak kurang mampu dioptimalkan dengan baik untuk menghasilkan sesuatu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas anggaran inspektorat Banda Aceh tergolong cukup efektif. Rasio anggaran dari tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 84.65%, tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 91.58% dan tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 82.21%. Tingkat efektivitas anggaran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut merupakan hal yang kurang baik karena diiringi dengan peningkatan dan penurunan pengelolaan anggaran.
2. Efisiensi anggaran Inspektorat Banda Aceh. Rasio efisiensi anggaran dari tahun 2018 sebesar 98.91%, tahun 2019 sebesar 92.57% dan tahun 2020 sebesar 89.67%. Tingkat efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan dan kemajuan Inspektorat Banda Aceh, Yaitu:

1. Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan yang sebenarnya, maka kiranya perlu diambil beberapa kebijaksanaan agar perusahaan mampu memperhitungkan estimasi-estimasi kejadian pada masa yang akan datang sehingga realisasi dengan anggaran tidak jauh berbeda.

2. Mengingat pentingnya suatu efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan, maka sebaiknya anggaran dan program disusun secara teliti dan sebaiknya dilakukan secara seksama sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, Lisa (2015). "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ambiguitas Peran dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi". Padang: *ejournal.unp.ac.id*.
- Halim, Abdul (2016). Akuntasni Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Jannah, Roudlotul (2017). "Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Kebumen" *Journal of Chemical Information and Modeling lib.STIE Putrabangsa ac.id*.
- Mahmudi (2016). Analisis Laporan Kuangan Pemerintah Derah. Yogyakarta UPP STIM YKPN.
- Mulyadi (2016) Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar,(2010) Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan. BEFE, Yogyakarta
- Narifin,M (2012). Penganggaran Perusahaan. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Pangkey, Immanuel dan Sherly (2015). " Analisis Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawsi Utara". *Journal EMBA: Jurnal Riset ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thun 2006 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Thun 2011 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Thun 2005 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Thun 2007 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Thun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Prawironerogo, Darsono & Ari Purwanti (2013). Akuntansi Manajemen. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Robbins,SP, dan Judge (2015). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko dan Parulian (2015). *Anggaran* . Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, U (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sumenge, Ariel Sharon (2013)” Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan”. *Journal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*